



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 juni 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 902.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN TAHUN 2015

A. STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	KPU Provinsi				
	a. Ketua	1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 12 bulan
	b. Anggota	4 org	org/bln	Rp -	sda
2	Sekretariat KPU Provinsi				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	Rp -	sda
	b. Kabag	3 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Kasubag	6 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Bendahara	1 org	org/bln	Rp -	sda
	e. Pelaksana	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	sda
	f. Tenaga Pendukung	paling banyak 6 org	org/bln	Rp -	sda
3	Anggota Pokja KPU Provinsi				
	a. Pokja Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
	b. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	c. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
	d. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 6 bulan
	e. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	f. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	g. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 8 bulan
	h. Pokja Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 8 bulan
	i. Pokja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 5 bulan
	j. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	k. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	l. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	m. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 7 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	o. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Laporan	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	p. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
	q. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	paling banyak 12 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
4	KPU Kabupaten/Kota				
	a. Ketua	1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 12 bulan
	b. Anggota	4 org	org/bln	Rp -	sda
5	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	Rp -	sda
	b. Kasubag	4 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Bendahara/ Bendahara Pembantu	1 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Pelaksana	paling banyak 8 org	org/bln	Rp -	sda
	e. Tenaga Pendukung	paling banyak 6 org	org/bln	Rp -	sda
6	Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota				
	a. Pokja Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
	b. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	c. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
	d. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 6 bulan
	e. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	f. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	g. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 8 bulan
	h. Pokja Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 8 bulan
	i. Pokja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 5 bulan
	j. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	paling banyak 10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	KETERANGAN	
		VOLUME	SATUAN	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
	k. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	l. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	m. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 7 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	o. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 4 bulan
	p. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
	q. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
7	Panitia Pemilihan Kecamatan					
	a. Ketua		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota		4 org	org/bln	Rp -	sda
8	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan					
	a. Sekretaris		1 org	org/bln	Rp -	sda
	b. Bendahara Pembantu/ PUMK		1 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Anggota	paling banyak	3 org	org/bln	Rp -	sda
9	Panitia Pemungutan Suara					
	a. Ketua		1 org	org/bln	Rp -	sda
	b. Anggota		2 org	org/bln	Rp -	sda
10	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara					
	a. Sekretaris		1 org	org/bln	Rp -	sda
	b. Urusan Teknis Penyelenggaraan		1 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Urusan TU Keuangan		1 org	org/bln	Rp -	sda
11	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara					
	a. Ketua		1 org	org/ paket	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan
	b. Anggota		6 org	org/ paket	Rp -	sda
	c. Linmas		2 org	org/ paket	Rp -	sda
12	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah
13	Bawaslu Provinsi					
	a. Ketua		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 12 bulan
	b. Anggota		2 org	org/bln	Rp -	sda
14	Sekretariat Bawaslu Provinsi					
	a. Kepala Sekretariat		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 12 bulan
	b. Kasubbag		3 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Bendahara		1 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Pelaksana	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
	e. Tenaga Pendukung	paling banyak	5 org	org/bln	Rp -	sda
15	Anggota Pokja Bawaslu Provinsi					
	a. Pokja Sentra Gakkumdu	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Pokja Sengketa Pemilu	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
	c. Pokja Pengawasan DPT	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Pokja Pengawasan Pencalonan	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
	e. Pokja Pengawasan Kampanye	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
	f. Pokja Pengawasan Pungut Hitung	paling banyak	13 org	org/bln	Rp -	sda
	g. Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil	paling banyak	13 org	org/bln	Rp -	sda
	h. Pokja Pengawasan PHPU	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
16	Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Ketua		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 12 bulan
	b. Anggota		2 org	org/bln	Rp -	sda
17	Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Kepala Sekretariat		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 12 bulan
	b. Bendahara		1 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Pelaksana	paling banyak	6 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Tenaga Pendukung	paling banyak	4 org	org/bln	Rp -	sda
18	Anggota Pokja Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Pokja Sentra Gakkumdu	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Pokja Sengketa Pemilu	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
	c. Pokja Pengawasan DPT	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Pokja Pengawasan Pencalonan	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
	e. Pokja Pengawasan Kampanye	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	KETERANGAN	
		VOLUME	SATUAN	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
	f. Pokja Pengawasan Pungut Hitung	paling banyak	13 org	org/bln	Rp -	sda
	g. Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil	paling banyak	13 org	org/bln	Rp -	sda
	h. Pokja Pengawasan PHPU	paling banyak	8 org	org/bln	Rp -	sda
19	Panwas Kecamatan					
	a. Ketua		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota		2 org	org/bln	Rp -	sda
20	Sekretariat Panwas Kecamatan					
	a. Kepala Sekretariat		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Bendahara Pembantu/PUMK		1 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Tenaga Pendukung	paling banyak	3 org	org/bln	Rp -	sda
21	Anggota Pokja Panwas Kecamatan					
	a. Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye	paling banyak	6 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 3 bulan
	b. Pokja Pengawasan Pungut Hitung	paling banyak	6 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
	c. Pokja Pengawasan Rekapitulasi	paling banyak	6 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
22	Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 6 bulan
23	Pengawas TPS		1 org	org/bln	Rp -	masa kerja paling lama 1 bulan
II	UANG LEMBUR					
1	KPU Provinsi/Kabupaten/Kota					
	a. KPU Provinsi	paling banyak	29 org	org/bln	Rp -	paling lama 10 hari setiap bulan
	b. KPU Kabupaten/Kota	paling banyak	24 org	org/bln	Rp -	sda
	c. PPK	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	sda
	d. PPS	paling banyak	6 org	org/bln	Rp -	sda
	e. Petugas Pemutakhiran Data	paling banyak	1 org	org/bln	Rp -	sda
2	BAWASLU/PANWAS					
	a. Bawaslu Provinsi	paling banyak	12 org	org/bln	Rp -	paling lama 10 hari setiap bulan
	b. Panwas Kabupaten/Kota	paling banyak	10 org	org/bln	Rp -	sda
	c. Panwas Kecamatan	paling banyak	7 org	org/bln	Rp -	sda
	d. Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan	paling banyak	1 org	org/bln	Rp -	sda

B. STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA KPU PROVINSI

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan				
a.	Cetak surat suara (- DPT x 102.5%) + 2000 lembar x Rp -	-	lembar	Rp	-
b.	Penggandaan Formulir				
-	Formulir A KWK - TPS x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Formulir B KWK - paket x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Formulir C KWK - TPS x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Formulir D KWK - PPS x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Formulir DA KWK - PPK x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Formulir DB KWK - Kab/Kota x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Formulir DC KWK - Prov x - lembar x Rp -	-	paket	Rp	-
c.	Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan				
-	Provinsi - Prov x - eks x Rp -	-	paket	Rp	-
-	Kabupaten/Kota - Kab/Kota x - eks x Rp -	-	paket	Rp	-
-	PPK - PPK x - eks x Rp -	-	paket	Rp	-
-	PPS - PPS x - eks x Rp -	-	paket	Rp	-
-	KPPS/TPS (Buku Panduan) - TPS x - eks x Rp -	-	paket	Rp	-
-	PPDP - TPS x - eks x Rp -	-	paket	Rp	-
2	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya				
a	Kotak Surat Suara - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
b	Bilik suara - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
c	Tinta sidik jari - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
d	Segel				
1	Tingkat Prov (- keping x - Prov) x Rp -	-	keping	Rp	-
2	Tingkat Kab/Kota ((- keping x - Kab/Kota) + (- keping x - TPS)) x Rp -	-	keping	Rp	-
3	Tingkat PPK ((- keping x - PPK) + (- keping x - TPS)) x Rp -	-	keping	Rp	-
4	Tingkat KPPS (- keping x - TPS) x Rp -	-	keping	Rp	-
e	Sampul (Kubus dan Biasa)				
1	Sampul II.S1 KWK - buah x - Kab/Kota x Rp -	-	buah	Rp	-
2	Sampul II.S2 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
3	Sampul III.S1 KWK - buah x - PPK x Rp -	-	buah	Rp	-
4	Sampul DAA KWK - buah x - PPS x Rp -	-	buah	Rp	-
5	Sampul V.S1 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
6	Sampul V.S2.1 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
7	Sampul V.S2.2 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
8	Sampul V.S2.3 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
9	Sampul V.S3 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
10	Sampul kecil - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
11	Sampul DPT/DPT-b - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
f	Bantalan dan Alat Pencoblos - set x - TPS x Rp -	-	set	Rp	-
g	Tanda pengenal (9 + - saksi) x - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp	-
h	Karet pengikat - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
i	Lem perekat ((- botol x - PPK) + (- botol x - TPS)) x Rp -	-	botol	Rp	-
j	Kantong plastik besar ((- buah x - PPS) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp	-
k	Ballpoint ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp	-
l	Gembok ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp	-
m	Spidol besar ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp	-
n	Spidol kecil ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp	-
o	Sticker nomor Kotak Suara - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp	-
p	Alat bantu tuna netra - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp	-
q	Daftar pasangan calon - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp	-
r	Hologram - keping x - TPS x Rp -	-	keping	Rp	-
s	Sarana/papan pengumuman - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp	-
t	Salinan DPT (3 + - saksi) x - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp	-
u	Kotak untuk BA Rekapitulasi ((1 buah x - Kab/Kota) + (- buah x - PPK)) x Rp -	-	buah	Rp	-
v	Stiker label Kotak untuk BA ((1 buah x - Kab/Kota) + (- buah x - PPK)) x Rp -	-	buah	Rp	-
3	Distribusi - PP (termasuk bongkar muat)				
-	Dari Provinsi ke Kab/Kota - PP x - Kab/Kota x Rp -	-	PP	Rp	-
-	Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PP x - PPK x Rp -	-	PP	Rp	-
-	Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PP x - PPS x Rp -	-	PP	Rp	-
-	Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - PP x - TPS x Rp -	-	PP	Rp	-
4	Pemeliharaan				
a.	Kantor/Inventaris - paket x - bulan x Rp -	-	PB	Rp	-
b.	Kendaraan Roda 4 dan 2 - paket x - bulan x Rp -	-	PB	Rp	-
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2				
a.	Roda 4 - unit x - bulan x Rp -	-	KB	Rp	-
b.	Roda 2 - unit x - bulan x Rp -	-	KB	Rp	-
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
KPU Provinsi					
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
b.	Listrik/Telp./Air - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
c.	Sidang/Rapat Biasa - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
d.	Pengamanan Kantor - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
e.	Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - paket x Rp -	-	paket	Rp	-
f.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi & Pelaporan - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KKB	Rp	-
g.	Dokumentasi/Publikasi - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KKB	Rp	-
h.	Akuntan Publik - paket x Rp -	-	paket	Rp	-
KPU Kabupaten/Kota					
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
b.	Listrik/Telp./Air - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
c.	Sidang/Rapat Biasa - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
d.	Pengamanan Kantor - bulan x Rp -	-	bulan	Rp	-
e.	Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - paket x Rp -	-	paket	Rp	-
f.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi & Pelaporan - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KKB	Rp	-
g.	Dokumentasi/Publikasi - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KKB	Rp	-
h.	Akuntan Publik - paket x Rp -	-	paket	Rp	-

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
	PPK				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	c. Sidang/Rapat Biasa - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	d. Sewa Gedung Kantor *) - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	PPS				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Desa/Kel x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	KPPS				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - TPS x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - TPS x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	c. Uang Makan - TPS x Rp - x - orang	-	D/KB	Rp -	
	d. Tenda, Meja & Kursi - TPS x Rp -	-	D/KB	Rp -	
7	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *)				
	a. Kendaraan Operasional Roda 4 - unit x Rp - x - bulan	-	unit	Rp -	
	b. Kendaraan Operasional Roda 2 - unit x Rp - x - bulan	-	unit	Rp -	
	c. Kendaraan Lainnya - unit x Rp - x - kali	-	kali	Rp -	
8	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS				
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS (- orang x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS (- orang x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp -	-	OK	Rp -	
9	Pengelolaan Logistik Pilkada				
	a. Sewa gudang *) - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Pengamanan gudang - orang x - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	OK	Rp -	
	c. Pengawasan Pencetakan Surat Suara - orang x - Kab/Kota x - hari x Rp -	-	OK	Rp -	
	d. Sortir dan lipat Surat Suara ((- DPT x 102.5%) + 2000 lembar) x Rp -	-	lembar	Rp -	
	e. Pengesetan Formulir ((1 paket x - PPK) + (1 paket x - TPS)) x Rp -	-	lembar	Rp -	
	f. Penyiapan kotak dan bilik suara				
	- Kotak Suara (termasuk mur dan baut) (- buah x - TPS) x Rp -	-	buah	Rp -	
	- Bilik Suara (termasuk mur dan baut) (- buah x - TPS) x Rp -	-	buah	Rp -	
10	Persiapan Pemungutan Suara				
	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (- DPT x 102.5%) x Rp -	-	DPT	Rp -	
11	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi (- DPT x 102.5%) x Rp -	-	DPT	Rp -	
12	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA				
	a. Raker / Pelatihan - Kab/Kota x - Raker/Pelatihan x Rp - x - KK	-	KK	Rp -	
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota x - Raker/Pelatihan x Rp -	-	KK	Rp -	
13	Advokasi Hukum - Provinsi x 1 paket x Rp -	-	paket	Rp -	
14	Rapat Kerja				
	a. Dalam Rangka Raker				
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
15	Perjalanan Dinas				
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :				
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
16	Pencalonan				
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada Masyarakat - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi - Desa/Kel. x - paket/Durasi x Rp -	-	paket	Rp -	
17	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan				
	a. KPU Provinsi - Provinsi x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. KPU Kabupaten/Kota - Kabupaten x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. PPK - Kecamatan x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	d. PPS - Desa x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
18	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye **)				
	a. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. Bahan Kampanye - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. Alat Peraga - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	d. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
19	Proses Perhitungan Suara				
	a. Pelatihan Operator Komputer - Kab/Kota x - Hr x - orang x Rp -	-	OB	Rp -	
	b. Operator Komputer - orang x - Hr x - Kec x Rp -	-	OB	Rp -	
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - paket x - Kl x	-	paket	Rp -	
20	Audit dan Pengumuman Dana Kampanye - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	JUMLAH				

Keterangan : *) Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah
**) Sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015

C. STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA BAWASLU PROVINSI

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan				
	a. Bawaslu Provinsi - Prov x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp -	-	KK	Rp -	
	c. Panwas Kecamatan - Kecamatan x Rp -	-	KK	Rp -	
2	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2				
	- Bawaslu Provinsi				
	a. Roda 4 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
	b. Roda 2 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
	- Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Roda 4 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
	b. Roda 2 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	- Bawaslu Provinsi				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
	b. Rapat Biasa - orang x - bulan x Rp - x - kali	-	bulan	Rp -	
	- Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air/Internet - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
	c. Rapat Biasa - paket x Rp - x - kali	-	paket	Rp -	
	d. Kartu Identitas (ID Card) untuk Panwascam, PPL dan Pengawas TPS - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	- Panwas Kecamatan				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) (untuk kebutuhan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) - Kecamatan x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air/Internet - Kecamatan x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	c. Rapat Biasa - Kecamatan x - bulan x Rp - x - kali	-	D/KB	Rp -	
	- PPL				
	Rapat Biasa - Desa/Kel x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	- Pengawas TPS				
	Uang Makan - TPS x 1 orang x Rp - x 2	-	D/KB	Rp -	
4	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS				
	a. Administrasi Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS (- orang x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Pelantikan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS (- orang x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp -	-	OK	Rp -	
5	Bimtek/Pelatihan				
	a. Bimtek/Pelatihan Panwas Kab/Kota (di Provinsi) - kali x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota) - kali x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. Bimtek/Pelatihan PPL (di Kecamatan) - kali x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	d. Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (di Kecamatan) - TPS x - orang x Rp -	-	OK	Rp -	
6	Advokasi Hukum				
	a. Advokasi Hukum di Provinsi - Provinsi x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Advokasi Hukum di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilu				
	a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Provinsi - Provinsi x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	c. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan - Kecamatan x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
8	FGD/Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif				
	a. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Provinsi - Provinsi x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	c. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan - Kecamatan x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
9	Musyawarah Penyelesaian Sengketa				
	a. Penyelesaian Sengketa di Provinsi - Provinsi x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
10	Kegiatan Sentra Gakkumdu				
	a. Penanganan Pelanggaran di Provinsi - Provinsi x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Penanganan Pelanggaran di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
11	Sewa Gedung Kantor *)				
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x - bulan # x Rp -	-	KB	Rp -	
	b. Kecamatan - Kecamatan x - bulan # x Rp -	-	KB	Rp -	
12	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *)				
	- Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Kendaraan Operasional Roda 4 - unit x - bulan # x Rp -	-	UB	Rp -	
	b. Kendaraan Operasional Roda 2 - unit x - bulan # x Rp -	-	UB	Rp -	
	c. Kendaraan Lainnya - unit x - kali x Rp -	-	UB	Rp -	

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
13	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis				
	a. Dalam Rangka Raker/Rakor/Rakernis :				
	- Dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)	- orar x - kl x - Prov	x Rp -	-	OK Rp -
	- Dengan Panwas Kecamatan (di Kab/kota)	- orar x - kl x - Kab/Kota	x Rp -	-	OK Rp -
	- Dengan PPL (di Kecamatan)	- orar x - kl x - Kecamatan	x Rp -	-	OK Rp -
	- Dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel)	- orar x - kl x - TPS	x Rp -	-	OK Rp -
	b. Dalam Rangka Rakor :				
	- Dengan Stakeholder di Provinsi	- orar x - kl x - Prov	x Rp -	-	OK Rp -
	- Dengan Stakeholder di Kab/kota	- orar x - kl x - Kab/Kota	x Rp -	-	OK Rp -
14	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik				
	- Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi				
	a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat	- orang x - Jakarta	x Rp -	-	OK Rp -
	b. Supervisi/Investigasi ke Kab/Kota	- orang x - Kab/Kota	x Rp -	-	OK Rp -
	c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan	- orang x - Kecamatan (selektif)	x Rp -	-	OK Rp -
	d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel	- orang x - Desa/Kel (selektif)	x Rp -	-	OK Rp -
	- Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat	- orang x - Jakarta	x Rp -	-	OK Rp -
	b. Konsultasi ke Provinsi	- orang x - Kab/Kota	x Rp -	-	OK Rp -
	c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan	- orang x - Kecamatan (selektif)	x Rp -	-	OK Rp -
	d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel	- orang x - Desa/Kel (selektif)	x Rp - x - Kab/Kota	-	OK Rp -
	- Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan				
	a. Konsultasi ke Kab/Kota	- orang x - Kab/Kota	x Rp -	-	OK Rp -
	b. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel	- orang x - Desa/Kel (selektif)	x Rp - x - Kec.	-	OK Rp -
	- Transport PPL				
	a. Konsultasi ke Kecamatan	- orang x - Kecamatan	x Rp -	-	OK Rp -
	b. Supervisi/Investigasi ke TPS	- orang x - TPS (selektif)	x Rp -	-	OK Rp -
	JUMLAH				

Keterangan : *) Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah

D. STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KPU KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Barang Cetak/Pengandaan				
a.	Cetak surat suara				
	(- DPT x 102.5%) + 2000 lembar x Rp -	-	lembar	Rp -	
b.	Pengandaan Formulir				
	- Formulir A KWK - TPS x - lembar x Rp -	-	paket	Rp -	
	- Formulir B KWK - paket x - lembar x Rp -	-	paket	Rp -	
	- Formulir C KWK - TPS x - lembar x Rp - x 1 tahap	-	paket	Rp -	
	- Formulir D KWK - PPS x - lembar x Rp - x 1 tahap	-	paket	Rp -	
	- Formulir DA KWK - PPK x - lembar x Rp - x 1 tahap	-	paket	Rp -	
	- Formulir DB KWK - Kab/Kota x - lembar x Rp - x 1 tahap	-	paket	Rp -	
	- Formulir DC KWK - Prov x - lembar x Rp - x 1 tahap	-	paket	Rp -	
c.	Pengandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan				
	- Kabupaten/Kota - Kab/Kota x - eks x Rp -	-	paket	Rp -	
	- PPK - PPK x - eks x Rp -	-	paket	Rp -	
	- PPS - PPS x - eks x Rp -	-	paket	Rp -	
	- KPSS/TPS (Buku Panduan) - TPS x - eks x Rp -	-	paket	Rp -	
	- PPDP - TPS x - eks x Rp -	-	paket	Rp -	
2	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya				
a	Kotak Surat Suara - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
b	Bilik suara - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
c	Tinta sidik jari - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
d	Segel				
	1) Tingkat Kab/Kota ((- keping x - Kab/Kota) + (- keping x - TPS)) x Rp -	-	keping	Rp -	
	2) Tingkat PPK ((- keping x - PPK) + (- keping x - TPS)) x Rp -	-	keping	Rp -	
	3) Tingkat KPSS (- keping x - TPS) x Rp -	-	keping	Rp -	
e	Sampul (Kubus dan Biasa)				
	1) Sampul II.S1 KWK - buah x - Kab/Kota x Rp -	-	buah	Rp -	
	2) Sampul II.S2 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	3) Sampul III.S1 KWK - buah x - PPK x Rp -	-	buah	Rp -	
	4) Sampul DAA KWK - buah x - PPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	5) Sampul V.S1 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	6) Sampul V.S2.1 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	7) Sampul V.S2.2 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	8) Sampul V.S2.3 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	9) Sampul V.S3 KWK - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	10) Sampul kecil - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
	11) Sampul DPT/DPT-b - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
f	Bantalan dan Alat Pencablos - set x - TPS x Rp -	-	set	Rp -	
g	Tanda pengenal (9 + - saksi) x - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp -	
h	Karet pengikat - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
i	Lem perekat ((- botol x - PPK) + (- botol x - TPS)) x Rp -	-	botol	Rp -	
j	Kantong plastik besar ((- buah x - PPS) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp -	
k	Ballpoint ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp -	
l	Gembok ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp -	
m	Spidol besar ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp -	
n	Spidol kecil ((- buah x - PPK) + (- buah x - TPS)) x Rp -	-	buah	Rp -	
o	Sticker nomor Kotak Suara - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp -	
p	Alat bantu tuna netra - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp -	
q	Daftar pasangan calon - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp -	
r	Hologram - keping x - TPS x Rp -	-	keping	Rp -	
s	Sarana/papan pengumuman - buah x - TPS x Rp -	-	buah	Rp -	
t	Salinan DPT (3 + - saksi) x - lembar x - TPS x Rp -	-	lembar	Rp -	
u	Kotak untuk BA Rekapitulasi ((1 buah x - Kab/Kota) + - buah x - PPK)) x Rp -	-	buah	Rp -	
v	Stiker label Kotak untuk BA ((1 buah x - Kab/Kota) + - buah x - PPK)) x Rp -	-	buah	Rp -	
3	Distribusi - PP (termasuk bongkar muat)				
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PP x - PPK x Rp -	-	PP	Rp -	
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PP x - PPS x Rp -	-	PP	Rp -	
	- Dari Desa/Kel ke KPSS (TPS) - PP x - TPS x Rp -	-	PP	Rp -	
4	Pemeliharaan				
a.	Kantor/Inventaris - paket x - bulan x Rp -	-	PB	Rp -	
b.	Kendaraan Roda 4 dan 2 - paket x - bulan x Rp -	-	PB	Rp -	
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2				
a.	Roda 4 - unit x - bulan x Rp -	-	KB	Rp -	
b.	Roda 2 - unit x - bulan x Rp -	-	KB	Rp -	
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	KPU Kabupaten/Kota				
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
b.	Listrik/Telp./Air - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
c.	Sidang/Rapat Biasa - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
d.	Pengamanan Kantor - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
e.	Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
f.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi & Pelaporan - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KKB	Rp -	
g.	Dokumentasi/Publikasi - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KKB	Rp -	
h.	Akuntan Publik - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	PPK				
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
b.	Listrik/Telp./Air - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
c.	Sidang/Rapat Biasa - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
d.	Sewa Gedung Kantor *) - PPK x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	PPS				
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - Desa/Kel x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
b.	Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	KPSS				
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - TPS x Rp -	-	D/KB	Rp -	
b.	Listrik/Telp./Air - TPS x Rp -	-	D/KB	Rp -	
c.	Uang Makan - TPS x Rp - x - orang	-	D/KB	Rp -	
d.	Tenda, Meja & Kursi - TPS x Rp -	-	D/KB	Rp -	

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
7	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *)				
	a. Kendaraan Operasional Roda 4 - unit x Rp - x - bulan	-	unit	Rp -	
	b. Kendaraan Operasional Roda 2 - unit x Rp - x - bulan	-	unit	Rp -	
	c. Kendaraan Lainnya - unit x Rp - x - kali	-	kali	Rp -	
8	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS				
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS (- orar x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS (- orar x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp -	-	OK	Rp -	
9	Pengelolaan Logistik Pilkada				
	a. Sewa gudang *) - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Pengamanan gudang - orang x - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	OK	Rp -	
	c. Pengawasan Pencetakan Surat Suara - orang x - Kab/Kota x - hari x Rp -	-	OK	Rp -	
	d. Sortir dan lipat Surat Suara ((- DPT x 102.5%) + 2000 lembar) x Rp -	-	lembar	Rp -	
	e. Pengesetan Formulir ((1 paket x - PPK) + (1 paket x - TPS)) x Rp -	-	lembar	Rp -	
	f. Penyiapan kotak dan bilik suara				
	- Kotak Suara (termasuk mur dan baut) (- buah x - TPS) x Rp -	-	buah	Rp -	
	- Bilik Suara (termasuk mur dan baut) (- buah x - TPS) x Rp -	-	buah	Rp -	
10	Persiapan Pemungutan Suara				
	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (- DPT x 102.5%) x Rp -	-	DPT	Rp -	
11	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi (- DPT x 102.5%) x Rp -	-	DPT	Rp -	
12	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA				
	a. Raker / Pelatihan - Raker/Pelatihan x Rp - x - KK	-	KK	Rp -	
	b. Biaya Panitia - Raker/Pelatihan x Rp -	-	KK	Rp -	
13	Advokasi Hukum - Kab/Kota x 1 paket x Rp -	-	paket	Rp -	
14	Rapat Kerja				
	a. Dalam Rangka Raker				
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
15	Perjalanan Dinas				
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Dalam Rangka Konsultasi ke Provinsi - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	c. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :				
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	d. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
	e. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih - orang x - kl x Rp -	-	OK	Rp -	
16	Pencalonan				
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada Masyarakat - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi - Desa/Kel. x - paket/Durasi x Rp -	-	paket	Rp -	
17	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan				
	a. KPU Kabupaten/Kota - Kabupaten x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. PPK - Kecamatan x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. PPS - Desa x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
18	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye **)				
	a. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. Bahan Kampanye - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. Alat Peraga - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	d. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
19	Proses Perhitungan Suara				
	a. Pelatihan Operator Komputer - Kab/Kota x - Hr x - orang x Rp -	-	OB	Rp -	
	b. Operator Komputer - orang x - Hr x - Kec x Rp -	-	OB	Rp -	
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - paket x - Kl x	-	paket	Rp -	
20	Audit dan Pengumuman Dana Kampanye - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	JUMLAH				

Keterangan : *) Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah
**) Sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015

E. STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PANWAS KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan				
	a. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Panwas Kecamatan - Kecamatan x Rp -	-	KK	Rp -	
2	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2				
	- Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Roda 4 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
	b. Roda 2 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	- Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air/Internet - bulan x Rp -	-	bulan	Rp -	
	c. Rapat Biasa - paket x Rp - x - kali	-	paket	Rp -	
	d. Kartu Identitas (ID Card) untuk Panwascam, PPL dan Pengawas TPS - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	- Panwas Kecamatan				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) (untuk kebutuhan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) - Kecamatan x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air/Internet - Kecamatan x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	c. Rapat Biasa - Kecamatan x - bulan x Rp - x - kali	-	D/KB	Rp -	
	- PPL				
	Rapat Biasa - Desa/Kel x - bulan x Rp -	-	D/KB	Rp -	
	- Pengawas TPS				
	Uang Makan - TPS x 1 orang x Rp - x 2	-	D/KB	Rp -	
4	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS				
	a. Administrasi Pembentukan Panwas (- orang x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp - Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	-	OK	Rp -	
	b. Pelantikan Panwas Kecamatan, PPL, (- orang x - Kec + - orang x - Desa/Kel. + - orang x - TPS) x Rp - dan Pengawas TPS	-	OK	Rp -	
5	Bimtek/Pelatihan				
	a. Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota) - kali x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	b. Bimtek/Pelatihan PPL (di Kecamatan) - kali x - paket x Rp -	-	paket	Rp -	
	c. Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (di Kecamatan) - TPS x - orang x Rp -	-	OK	Rp -	
6	Advokasi Hukum				
	Advokasi Hukum di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilu				
	a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan - Kecamatan x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
8	FGD/Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif				
	a. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
	b. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan - Kecamatan x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
9	Musyawarah Penyelesaian Sengketa				
	Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
10	Kegiatan Sentra Gakkumdu				
	Penanganan Pelanggaran di Kab/Kota - Kab/Kota x - paket x Rp -	-	KK	Rp -	
11	Sewa Gedung Kantor *)				
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x - bulan x Rp -	-	KB	Rp -	
	b. Kecamatan - Kecamatan x - bulan x Rp -	-	KB	Rp -	
12	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *)				
	- Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Kendaraan Operasional Roda 4 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
	b. Kendaraan Operasional Roda 2 - unit x - bulan x Rp -	-	UB	Rp -	
	c. Kendaraan Lainnya - unit x - kali x Rp -	-	UB	Rp -	
13	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis				
	a. Dalam Rangka Raker/Rakor/Rakernis :				
	- Dengan Panwas Kecamatan (di Kab/kota) - orang x - kl x - Kab/Kota x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan PPL (di Kecamatan) - orang x - kl x - Kecamatan x Rp -	-	OK	Rp -	
	- Dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel) - orang x - kl x - TPS x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Dalam Rangka Rakor :				
	- Dengan Stakeholder di Kab/kota - orang x - kl x - Kab/Kota x Rp -	-	OK	Rp -	
14	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik				
	- Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota				
	a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat - orang x - Jakarta x Rp -	-	OK	Rp -	
	b. Konsultasi ke Provinsi - orang x - Kab/Kota x Rp -	-	OK	Rp -	
	c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan - orang x - Kecamatan (selektif) x Rp -	-	OK	Rp -	
	d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel - orang x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota	-	OK	Rp -	

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
	- Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan				
	a. Konsultasi ke Kab/Kota	- orang	x - Kab/Kota	x Rp	-
	b. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel	- orang	x - Desa/Kel (selektif)	x Rp	- x - Kec.
	- Transport PPL				
	a. Konsultasi ke Kecamatan	- orang	x - Kecamatan	x Rp	-
	b. Supervisi/Investigasi ke TPS	- orang	x - TPS (selektif)	x Rp	-
	JUMLAH				

Keterangan : *) Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO